



► POS BANTUAN HUKUM

## Layanan Hukum Harus Ramah & Humanis

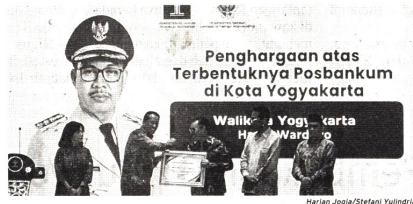
**K**ementeria Hukum (Kemenkum) mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Jogja. Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menilai layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan tersebut penting untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat.

Hasto menegaskan penegakan hukum seharusnya tidak mengandung semangat memperlakukan atau membalas dendam, melainkan berorientasi pada perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

"Spirit hukum itu jangan untuk memperlakukan, apalagi

membalas dendam. Hukum harus melindungi dan menghormati hak-hak pribadi serta nilai-nilai kemanusiaan," katanya di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Selasa (20/1).

Menurutnya, keberadaan Posbankum di tingkat kelurahan diharapkan mampu menghadirkan layanan hukum yang lebih ramah dan humanis. Dia menilai banyak persoalan hukum di masyarakat yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus dibawa ke ranah peradilan. "Banyak kasus yang tidak harus diproses secara hukum. Kalau masih bisa dimediasi dan didamaikan, kenapa harus dilanjutkan ke proses hukum."



Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo (tiga dari kanan) menerima penghargaan pendirian Posbankum di Kota Jogja dari Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas (dua dari kiri) di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Selasa (20/1).

ujarnya.

Hasto menambahkan, layanan Posbankum juga berperan dalam

memitigasi konflik hukum di masyarakat serta mendorong penyelesaian persoalan secara

damai, sepanjang tidak termasuk tindak pidana murni yang wajib diproses secara hukum.

Dia berharap masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan bantuan hukum tersebut, terutama untuk persoalan-persoalan yang selama ini kerap enggan diungkap karena rasa takut atau tekanan tertentu, seperti sengketa tanah maupun kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). "Dengan adanya bantuan hukum di tingkat kelurahan, masyarakat jangan takut untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang bersifat menindas. Lebih baik disampaikan agar bisa ditangani," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum DIY, Agung Rektono Seto, menyampaikan sebanyak 438 Posbankum telah dibentuk di DIY. Sebelum pembentukan Posbankum, jajarannya terlebih dahulu menggelar pelatihan paralegal dengan menggandeng sejumlah organisasi bantuan hukum di DIY.

Pembentukan Posbankum menjadi langkah strategis untuk merespons dan menyesuaikan dinamika konflik sosial yang berkembang di masyarakat. "Keberadaan Posbankum ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik di masyarakat secara lebih efektif dan berkeadilan," ujarnya. (Stefani Yulindriani/\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005